

# **KAJIAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA**

**ABDUL HARIS**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dan memberikan alternative pemikiran mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda di masa yang akan datang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidana. Teori tentang tujuan pidana meliputi teori absolut atau teori pembalasan, dimana pidana merupakan akibat buruk yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan; teori relative atau teori tujuan pidana dan teori gabungan. Terkait dengan tujuan pidana, teori integrative sebagai upaya memulihkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat karena adanya kerusakan individual dan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian karena menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian yakni kebijakan dalam menetapkan atau merumuskan pidana denda dalam undang-undang.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa kebijakan legislative mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana mempunyai banyak kelemahan karena masih mengacu pada aturan umum Buku I KUHP yang merupakan turunan WvS Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Kebijakan legislative mengenai pelaksanaan pidana denda hanya mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar, yaitu kurungan pengganti dengan lamanya kurungan diatur dalam hukum acara pidana. Beberapa perundang-undangan pidana yang memuat ketentuan pidana denda masih mengacu Buku I KUHP, sedangkan undang-undang yang mengatur kurungan pengganti denda terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003. Agar pelaksanaan pidana denda lebih efektif maka kebijakan efektif harus memuat ketentuan mengenai pengaturan pedoman penjatuhan pidana denda, sistem perumusan ancaman pidana denda, penentuan batas waktu pembayaran denda, dan cara pembayaran denda serta alternative pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

Saran yang disampaikan adalah sebagai suatu system penjatuhan pidana harus mengacu atau berpedoman pada KUHP sebagai induk aturan umum semua peraturan hukum pidana. Untuk itu diperlukan kebijakan legislative suatu sistem sanksi pidana denda yang dapat menjamin terlaksananya pidana denda. Kebijakan legislative yang diperlukan dalam menunjang efektifitas pidana denda bukan hanya meningkatkan ancaman pidana denda.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Denda

# **STUDY OF FINES IN CRIMINAL SANCTIONS JURIDICAL LEGISLATION CRIMINAL IN INDONESIA**

**ABDUL HARIS**

## **ABSTRACT**

This study was conducted to investigate the implementation of fines to criminal sanctions in criminal law in Indonesia and provide alternative ideas on the implementation of fines to criminal sanctions in the future. The theory used in this research is the theory of the purpose of punishment. Theories about the purpose of punishment include absolute theory or the theory of retaliation, where the criminal is a bad result which must exist as a retaliation against the person who committed the crime; relative theory or the theory and the theory of joint criminal purposes. Associated with the purpose of punishment, integrative theory as an attempt to restore balance, harmony and harmony in society because adanyak individual and social damage. The method used is a normative legal research with normative juridical approach which is the main approach in the study due to be the primary focus in the research or formulating a policy in establishing criminal penalties in the legislation. Results of this study was formulated that legislative policy regarding the implementation of sanctions penalty in criminal law has many flaws because they refer to the general rule of Book I of the Penal Code which is a derivative of the Dutch WvS that does not comply with the current developments. Legislative policy regarding the implementation of criminal penalty only arrange replacement of unpaid fines, namely the replacement to the length of confinement cages arranged in criminal procedural law. Some criminal legislation containing provisions still refers to criminal penalties Book I of the Criminal Code, while legislation governing the confinement lieu of fines contained in the Act No. 10 of 1997, Law No. 5 of 1999 and Act No. 15 of 2002 on Money Laundering, which was amended by Act 25 of 2003. To be more effective execution of criminal penalties, the effective policy must contain a provision on setting the guidelines for the imposition of criminal penalties, the formulation of the threat of criminal penalties system, determining the penalty payment deadline, and the method of payment criminal fines and alternative replacement unpaid fines. Suggestions submitted is as a system of sentences should refer to or be guided by the Penal Code as a general rule holding all the rules of criminal law. It required a legislative policy of a system of criminal sanctions fines to ensure the implementation of criminal penalties. Legislative policy is needed to support the effectiveness of the criminal penalties not only increase the threat of criminal penalties.